

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Perjalanan Demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Pada setiap pemerintahan, baik pemerintahan Soekarno maupun pemerintahan Soeharto, demokrasi selalu menjadi topik yang tak pernah habis untuk diteliti. Banyak penelitian tentang jalannya demokrasi Indonesia baik pada masa Soekarno maupun pada masa Soeharto. Tak jarang, kedua pemerintahan tersebut dianggap tidak demokratis oleh beberapa pihak.

Pemerintahan Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin untuk menjaga stabilitas politik.¹ Pada praktiknya, Soekarno membubarkan partai dan membungkam pers, yang semakin membuatnya dianggap tidak demokratis. Jika memiliki pendapat berbeda dengan Soekarno, maka akan dianggap kontra-revolusi. Alhasil banyak anasir kekuatan yang menginginkannya lengser karena cenderung mengarah ke arah pemerintahan diktator.

Setelah Soekarno lengser digantikan oleh Soeharto. Pemerintahan Soeharto atau yang dikenal dengan Orde Baru membawa gagasan demokrasi pancasila sebagai antitesa demokrasi terpimpin. Demokrasi pancasila ialah demokrasi yang sebenarnya mengandaikan pencegahan mayorkrasi yaitu

¹ Hong Liu, *Soekarno, Tiongkok, dan Pembentukan Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2015, hlm.229

diktator mayoritas atau penindasan minoritas.² Demokrasi pancasila itu melindungi dan memperhitungkan hidup minoritas, yang mewujudkan bagian esensiil pula daripada masyarakat Negara.³

Istilah demokrasi yang sering dikenal adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln.⁴ Namun, definisi tersebut dianggap masih abstrak. Oleh sebab itu, O.Notohamidjojo menjelaskan bahwa demokrasi ialah sistem pengorganisasian rakyat yang membutuhkan pemerintahan yang berwibawa.⁵

Pemerintahan yang kuat dan berwibawa ini yang coba ditonjolkan oleh Orde Baru kepada rakyat melalui berbagai macam pembangunan. Demi berlangsungnya pembangunan, demokrasi pancasila dijadikan tameng oleh Orde Baru untuk membungkam suara kritis terhadap pemerintah. Hal yang pernah dilakukan oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin seperti pemberedelan pers dan pembatasan kebebasan mengemukakan pendapat, kembali diterapkan oleh Orde Baru. Soeharto menganggap pers yang bertindak keterlaluan layak dihadapkan ke pengadilan:

“Pers harus bebas bertanggung jawab. Orang jangan hanya ingat pada hak, tapi juga kewajiban. Tanggung jawab kita bersama terletak pada kepentingan masyarakat yang luas dan kepentingan negara. Kalau ucapan dan pernyataan mereka sudah keterlaluan, keterlaluan melanggar hukum, dengan sendirinya bisa dihadapkan ke pengadilan.”⁶

² O.Notohamidjojo SH, *Demokrasi Pantjasila (dasar Nasional untuk Menegara)*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.77

³ *Ibid*, hlm.77

⁴ *Ibid*, hlm.69

⁵ *Ibid*, hlm.69

⁶ Soeharto, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi, Seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan KH*, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, hlm.422-423

Pers yang diberedel bukan hanya yang melakukan kritik keras terhadap Soeharto melainkan pers satir seperti Monitor. Pemerintah mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) majalah Monitor, setelah Monitor membuat survei mengenai orang yang paling populer di Indonesia pada Oktober 1990.⁷ Hasil survei itu menempatkan Soeharto di posisi pertama, mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Setelah survei itu, kantor redaksi Monitor dirusak massa dan Pemimpin Redaksi Monitor Arswendo Atmowiloto dipenjarakan. Semestinya, sebagai penganut negara demokrasi penyelesaiannya harus terlebih dahulu melalui dialog atau mekanisme jurnalistik. Sebab tanpa hal itu, pemberedelan Monitor merupakan pembungkaman kepada salah satu sarana demokrasi.

Tak hanya kebebasan berpendapat, semakin kuatnya pemerintahan Orde Baru diiringi dengan semakin terpusat dan tertutupnya kekuasaan. Terutama pada awal 1990 membuat rakyat hanya menjadi objek dalam pelaksanaan demokrasi. Padahal dalam negara yang mengandung prinsip demokrasi, misalnya, yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan ditentukan oleh rakyat, aturan hukum tentang hubungan antara masyarakat dengan penguasa dan antar-anggota masyarakat sendiri, akan mencerminkan perwujudan setiap kemungkinan dari pelaksanaan kekuasaan rakyat.⁸ Partisipasi masyarakat yang dihambat oleh Orde Baru dapat dikatakan sebagai matinya demokrasi. Masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima pasif segala aturan yang dikeluarkan oleh negara.

⁷ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011 hlm.42

⁸ Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1994, hlm.1

Pandangan Soeharto tentang demokrasi yang mementingkan kepentingan negara sangat bertolakbelakang dengan konstitusi. Konstitusi menyebutkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pandangan Soeharto yang mengutamakan negara, berakar pada filsafat yang melihat keseluruhan mendahului dan lebih penting daripada bagian-bagian lain. Menerapkannya dalam kehidupan politik, maka individu harus diperlakukan, dan memperoleh arti, sebagai bagian dari keseluruhan bernama negara.⁹ Implikasi konsep ini yang akan berujung pada negara kekuasaan.

Di bidang ekonomi, Soeharto meliberalkan semua Sumber Daya Alam Indonesia kepada pihak Asing melalui Undang-Undang penanaman Modal Asing (UU PMA) 1967. Tak hanya itu, Soeharto pun membuat dinasti ekonomi yang berisikan keluarga dan kroninya terutama keturunan Tionghoa serta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).¹⁰ Soeharto pun mengamini adanya dinasti ekonomi, meski begitu ia menganggap dinasti tersebut merupakan proses dari upaya mewujudkan ekonomi pancasila dan hanya bersifat sementara:

“Menyusun ekonomi pancasila tidak bisa sekaligus, kita memanfaatkan pengalaman dan semua potensi nasional yang ada. Semua mesti dihimpun. Dengan yang kemampuan yang dimiliki oleh keturunan tionghoa atau yang telah punya di bidang ekonomi. Modal dan pengalaman mereka harus dihimpun. Kalau itu dinasti ya hanya sementara...”¹¹

⁹ *Ibid*, hlm.viii

¹⁰ Jeffrey A. Winters, *Power in Motion: Modal Berpindah, Modal Berkuasa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm.100-102

¹¹ Soeharto, *Op.Cit.*, hlm. 379

Pada kenyataannya, meski pada periode 1980-an, Indonesia dapat dikatakan sedang mengalami masa keemasan dalam ekonomi dan pembangunan. Pendapatan negara Indonesia diperoleh dari pajak produksi minyak dan gas bumi serta penerimaan modal asing mencapai 73,3% dari seluruh pendapatan negara pada 1981—1982.¹² Pencapaian ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III 1979-1984.¹³ Masih banyak rakyat yang tak tersentuh dari hasil pembangunan. Tak hanya itu, demi pembangunan, banyak rakyat yang tergusur kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencahariannya.

Dinasti ekonomi yang menurut Soeharto hanya sementara tidak terbukti. Etnis keturunan Tionghoa rekanan Soeharto, memiliki 9 dari 10 kelompok bisnis di Indonesia dan mengontrol 80% dari aset yang dimiliki 300 perusahaan di Indonesia.¹⁴ Tak hanya itu, 13 dari 15 orang pembayar pajak tertinggi ialah orang Tionghoa.¹⁵

Bagi masyarakat yang tidak ingin kondisi tersebut terus terjadi melakukan perlawanan dengan tujuan dapat mendemokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara atau lebih dikenal dengan istilah kelompok pro-demokrasi. Salah satu kelompok gerakan pro-demokrasi adalah Forum Demokrasi. Kelompok yang diinisiasi oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, menghimpun 40 intelektual sebagai bentuk tanggapan atas jalannya

¹² Richard Robison, *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2012, hlm.97

¹³ *Ibid.*, hlm.139

¹⁴ Peter Kasenda, *Hari-Hari Terakhir Orde Baru*, Depok: Komunitas Bambu, 2015, hlm.31

¹⁵ *Ibid.*, hlm.31

demokrasi yang dijalankan oleh Soeharto. Forum Demokrasi didirikan pada 17 Maret 1991 di Cibeureum, Jawa Barat oleh 40 intelektual, diantaranya Bondan Gunawan, Dhaniel Dhakidae, Manuel Kaisiepo, dan Todung Mulya Lubis.¹⁶

Pembentukan Forum Demokrasi yang diinisiasi oleh intelektual tentu saja merupakan pengejawantahan dari definisi dan tugas intelektual. Menurut Antonio Gramsci, intelektual adalah seorang filsuf, seorang seniman, seorang manusia biasa, mereka berelaborasi dalam konsepsi dunia tertentu, mempunyai kesadaran atas aturan moral dan karenanya ikut serta menjaga konsepsi dunia atau memodifikasinya yakni membawa ke dalam jenis-jenis pemikiran baru.¹⁷ Dengan kata lain, Gramsci menyebut bahwa setiap orang adalah kaum intelektual atau semua manusia memiliki potensi untuk menjadi kaum intelektual, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dalam cara menggunakannya. Hanya saja, menurut Gramsci, tidak semua orang adalah intelektual dalam fungsi sosial.¹⁸

Mengenai fungsi dan tugas intelektual secara spesifik dipaparkan oleh Mohammad Hatta yang menyatakan bahwa kaum intelegensia adalah bagian daripada rakyat, warga negara yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.

¹⁶ Herdi Sahrasad, *Rezim Orde Baru dan Rezim Reformasi, Aceh : ISAC & Univeristy of Malikussaleh Press, 2005*, hlm.5

¹⁷ Antonio Gramsci, *Prison Notebooks: Catatan-Catatan dari Penjara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm.13

¹⁸ *Ibid*, hlm.3

Dalam Indonesia yang berdemokrasi, ia ikut serta bertanggung jawab tentang perbaikan nasib bangsa.¹⁹

Hal tersebut serupa dengan maksud didirikannya Forum Demokrasi yaitu untuk melakukan pemurnian pelaksanaan UUD 1945, khususnya yang berkenaan demokratisasi politik, ekonomi dan budaya dan perlunya pemikiran alternatif untuk menjawab permasalahan itu semua.²⁰ Pemurnian yang dimaksud ialah terwujudnya perubahan demi kebaikan mengenai sistem maupun mengenai personal yang menjadi inti penyebab stagnansi sosial-politik saat itu. Tujuan Forum Demokrasi mengusahakan terwujudnya alternatif dari maksud pendiriannya tersebut, dengan selalu mengembangkan budaya dialog secara permanen ke arah proses integrasi nasional yang bercorak eksistensial.²¹

Forum Demokrasi selalu berupaya memecahkan masalah yang ada di masyarakat dengan cara dialog atau musyawarah mufakat. Hal tersebut dianggap tidak tampak pada saat pemerintahan Soeharto, akibat represifnya pemerintah terhadap masyarakat. Forum Demokrasi yang dikoordinatori oleh Gus Dur juga berfungsi sebagai *pressure group* terhadap pemerintah.

Menjaga demokrasi, menurut Gus Dur, harus memunculkan sikap untuk lebih mengutamakan kemampuan melakukan perubahan, tanpa harus masuk dalam sistem kekuasaan.²² Tetapi, hubungan baik dengan pemerintah harus tetap

¹⁹ Mohammad Hatta, *Tanggung Jawab Moral Kaum Intelelegensia*, dalam Aswab Mahasin dan Ismed Nasir (ed.), *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm.13.

²⁰ Forum Demokrasi, *Draft Pertemuan Cibereum, tanpa tanggal terbit*

²¹ Forum Demokrasi, *Draft Pertemuan Cibereum, tanpa tanggal terbit*

²² Abdurrahman Wahid, *Islam, Pluralisme, dan Demokrasi*, dalam Arief Afandi (ed.), *Islam Demokrasi Atas Bawah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm.114

dijaga pada hal-hal tertentu. Ini pendekatan yang dilakukan Gus Dur yang hasilnya membawa kemudahan bagi para aktivis pro-demokrasi untuk memasuki perjuangan demokratisasi politik melalui lembaga-lembaga alternatif seperti Forum Demokrasi.

Salah satu hal yang menarik dari Forum Demokrasi ialah tidak bisa dibubarkan oleh pemerintah. Padahal, pada 1980-an, tepatnya pada 5 Mei 1980 terdapat kelompok pro-demokrasi yang bernama petisi 50. Akan tetapi, petisi 50 dapat dibubarkan dengan mudah oleh pemerintah pada 17 Agustus 1980, dengan dimatikan hak perdatanya..

Tak hanya itu, hingga saat ini, penulis meyakini bahwa belum ada penelitian spesifik mengenai Forum Demokrasi. Pada buku biografi Gus Dur yang ditulis oleh Greg Barton, *Genealogi Intelektual Muslim* karya Yudi Latif, *The Unfinished Nation* karya Max Lane, dan *Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* karya Daniel Dhakidae hanya membahas konteks kapan dan apa itu Forum Demokrasi, tanpa membahas konteks mengapa Forum Demokrasi ada, apa saja yang dilakukan Forum Demokrasi, dan bagaimana Forum Demokrasi melakukan perjalanannya dari awal hingga akhir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji perjalanan serta peran Forum Demokrasi. Khususnya jalannya Forum Demokrasi dalam pengembangan gagasan berkebangsaan, pluralistik, dan demokrasi yang tidak ada pada masa Orde Baru. Tak hanya itu, penulis juga ingin

mengungkapkan bahwa ada hubungan antara Forum Demokrasi dengan kegiatan aktivis 1990-an.

Pemilihan kurun waktu 1991—1999, mengingat pada 1991 merupakan didirikannya Forum Demokrasi dan kondisi politik nasional sedang memanas akibat pemeneraan Pemimpin Redaksi (pemred) tabloid Monitor dan pada 1991 pula, pemerintah atau pun partai-partai sedang sibuk menyusun kekuatan menjelang pemilu pada tahun berikutnya. Tak hanya itu, Forum Demokrasi pun tak lepas dari sikap represif pemerintah dengan melarang dan membubarkan kegiatan Forum Demokrasi.

B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan teori struktur agen dan teori konflik sebagai dasar analisa. Pertama, Teori struktur agen yang dikemukakan oleh Giddens menjelaskan, hubungan dialektika dan saling pengaruh-memengaruhi agen dan struktur. Manusia menurut Giddens, agen atau pelaku tujuan memiliki alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan mampu menguraikan alasan itu secara berulang. Seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Tindakan dari seorang agen tidak jarang dapat memengaruhi struktur di mana mereka menjalankan kiprahnya.²³

Pada konteks ini, penulis akan menekankan Gus Dur sebagai agen atau tokoh penting dalam Forum Demokrasi. Gus Dur salah satu intelektual yang

²³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm.508

cukup vokal dalam membicarakan pluralitas dan demokrasi membuat dirinya cukup diperhitungkan oleh penguasa. Tak hanya itu, sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur tentu saja memiliki banyak massa dan membuat pemerintah mesti berhati-hati, jika ingin membungkam Gus Dur. Hal itu yang kemudian membuat dirinya dipilih sebagai koordinator Forum Demokrasi. Tak hanya itu, Gus Dur dianggap tokoh moderat yang dapat diterima oleh semua golongan.

Kedua, Forum Demokrasi sebagai sebuah kelompok, penelitian ini menggunakan teori konflik sebagai dasar analisa perjalanan Forum Demokrasi. Teori konflik yang digagas oleh Dahendrof ini melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas.²⁴ Lebih lanjut, menurut teori konflik masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan.” Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.²⁵

Pada saat itu, kekuasaan Orde Baru ingin menciptakan kehidupan yang kondusif dengan cara represif demi terciptanya stabilitas keamanan. Soeharto tidak peduli cara yang ditempuh untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk menciptakan keamanan, bila perlu menggunakan cara-cara kekerasan. Soeharto beranggapan jika stabilitas keamanan terjamin, maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hirarki posisi otoritas. Karena

²⁴ *Ibid.*, hlm.153

²⁵ *Ibid.*, hlm.154

masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati posisi yang subordinat di unit lain. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi.²⁶ Di dalam setiap asosiasi, orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan *status quo*, sedangkan orang yang berada pada posisi subordinat berupaya mengadakan perubahan.²⁷

Pada saat itu, tentu saja posisi dominan dipegang oleh Soeharto. Semua kebijakannya baik politik maupun ekonomi serta sosial budaya, tak lain untuk mempertahankan kekuasannya. Akan tetapi, masyarakat yang diposisikan sebagai subordinat tidak puas dengan hal ini dan coba mengadakan perubahan. Salah satu bagian masyarakat yang tidak puas dengan Soeharto membentuk Forum Demokrasi. Forum ini didirikan atas rasa keprihatinan beberapa intelektual terhadap jalannya pemerintahan Soeharto yang tidak demokratis.²⁸ Forum Demokrasi menginginkan adanya perubahan kehidupan sosial, budaya, dan politik pada masyarakat.

Hal ini bisa tercipta jika Soeharto lengser dari pemerintahan atau dengan kata lain Forum Demokrasi menginginkan adanya suksesi. Artinya, ada konflik kepentingan antara Soeharto dan Forum Demokrasi. Soeharto ingin mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa, sedangkan Forum Demokrasi ingin Soeharto lengser dari posisinya. Meski hanya sebatas forum, Soeharto cukup terganggu dengan adanya Forum Demokrasi dan ingin membubarkannya, walau gagal. Kemudian, Forum Demokrasi pun menghimpun berbagai kalangan

²⁶ *Ibid.*, hlm.155

²⁷ *Ibid.*, hlm.156

²⁸ Forum Demokrasi, *Sekali Lagi tentang Forum Demokrasi*, 13 Mei 1991

pro-demokrasi yang tidak puas dengan Soeharto, baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi gerakan mahasiswa. Pada perjalanannya, Forum Demokrasi pun selalu menyikapi dengan kritis berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Forum Demokrasi memosisikan diri sebagai *pressure group*— oposisi— terhadap pemerintahan Orde Baru yang sempat tidak ada dalam beberapa waktu.

Hal ini sejalan dengan teori konflik yang melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasikan dan perubahan. Teori konflik pun menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan waktu dalam penelitian ini antara waktu 1991—1999. Sementara untuk pembatasan wilayah penelitian hanya fokuskan di wilayah Jakarta berdasarkan rentang waktu di atas. Batasan awal dari penelitian ini adalah pada 1991, tahun berdirinya Forum Demokrasi. Saat itu, situasi politik Indonesia cukup panas disebabkan banyaknya pencekalan terhadap beberapa orang dan tahun yang sibuk bagi parpol untuk mempersiapkan diri menuju pemilu 1992. Sedangkan, batasan akhir penelitian ini adalah pada 1999. Tahun tersebut merupakan berkurangnya intensitas kegiatan Forum Demokrasi. Musababnya, adanya anggapan bahwa sebagian cita-cita Forum Demokrasi sudah terwujud dan beberapa tokoh Forum Demokrasi masuk dalam pemerintahan. Pembatasan

penelitian ini hanya akan membahas mengenai peran serta kiprah perjalanan Forum Demokrasi.

2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dikaji penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengapa Forum Demokrasi didirikan?
- Bagaimana perjalanan Forum Demokrasi dan apa gagasan Forum Demokrasi?
- Mengapa Forum Demokrasi berakhir?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan serta mendokumentasikan peran Forum Demokrasi dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru. Selain itu, tujuan yang kedua untuk memaparkan bagaimana peran Forum Demokrasi dalam memberikan wacana alternatif terkait kehidupan berkebangsaan selama Orde Baru.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan tema-tema penulisan sejarah politik, khususnya sejarah

mengenai peran kaum intelektual dalam memperjuangkan dan memelihara demokrasi pada masa Orde Baru.

E. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan penyajian hasil penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif-naratif yang lebih banyak menguraikan kejadian-kejadian dalam dimensi ruang dan waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah yang meliputi (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) Interpretasi : analisis dan sintesis dan (5) penulisan.²⁹

Penelitian ini menempuh beberapa langkah. Pertama, pada tahap heuristik. Pada tahap menjajaki dan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan Orde Baru dan politik Islam. Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data melalui sumber lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan ini didapat dengan menggunakan metode sejarah lisan.

Penelitian sejarah lisan ini membutuhkan suatu metode pengumpulan data atau bahan penulisan sejarah yang dilakukan oleh peneliti sejarah melalui wawancara secara lisan terhadap pelaku atau saksi peristiwa. Dalam

²⁹ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah ,Yogyakarta : Bentang Pustaka, 2005 hlm.90

memperoleh sumber lisan maka peneliti akan melakukan wawancara dengan orang yang pernah terlibat di dalam Forum Demokrasi.

Selain itu, sumber tertulis ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Perpustakaan Daerah Ibukota (DKI) Jakarta, Perpustakaan kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pojok Gus Dur, surat kabar yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Kedua, dalam tahap kritik dilakukan pengujian terhadap otensitas dan kredibilitas sumber yang ada. Peneliti melakukan analisa data melalui metode sejarah dengan melakukan seleksi terhadap fakta yang ada. Ini dilakukan untuk mendapatkan fakta yang akurat.

Ketiga, pada tahap interpretasi, fakta-fakta yang telah didapat oleh peneliti, kemudian dilakukan interpretasi yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap objektif. Kalau pun dalam hal tertentu bersikap subjektif, harus subjektif rasional, bukan subjektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.

Terakhir, pada tahap penulisan, peneliti merangkai fakta berikut maknanya secara kronologis atau diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah dan mudah diterima oleh pembaca.

2. Sumber Penelitian

Dalam rangka penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder sesuai dengan kaidah penulisan sejarah yang ilmiah. Sumber primer merupakan peristiwa yang disampaikan langsung oleh saksi mata atau pelaku sejarah dokumen resmi seperti catatan rapat.³⁰ Sedangkan, sumber sekunder peristiwa yang disampaikan bukan oleh saksi mata dan hasil laporan seperti surat kabar.³¹ Adapun sumber-sumber yang akan digunakan antara lain:

Sumber primer: Dalam sumber lisan wawancara dengan orang yang pernah terlibat di dalam Forum Demokrasi seperti Marsillam Simanjuntak, Bondan Gunawan, Rahman Tolleng, Todung Mulya Lubis, Daniel Dhakidae, Rocky Gerung, Benny Tidayoh, Kemala Atmojo, Khatibul Umam Wiranu, Tri Agus Susanto Siswowiharjo dan Savic Ali. Sumber primer lain menggunakan arsip dalam sumber tertulis, maka peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen tertulis seperti notulensi Forum Demokrasi dan pernyataan sikap Forum Demokrasi.

Sumber sekunder: Wawancara dengan Alissa Wahid, anak pertama Gus Dur untuk mewakili pandangan Gus Dur dan melalui buku-buku, jurnal, artikel,

³⁰ *Ibid.*, hlm.100

³¹ *Ibid.*, hlm.101

laporan. Mengenai Surat Kabar, peneliti akan menggunakan surat kabar pro-pemerintah seperti Berita Yudha dan Suara Karya, serta koran atau majalah yang mencoba berposisi netral seperti Harian Kompas dan Majalah Tempo.